

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena perekonomian global yang terus bergerak maju akibat adanya globalisasi. Globalisasi ekonomi memicu peningkatan dalam sektor manufaktur, terutama di negara-negara berkembang. Tren terhadap permintaan produksi pakaian meningkat sejak tahun 1990-an yang mendorong produsen untuk memproduksi barang terus menerus dalam waktu yang singkat akibat tingginya permintaan dan mampu memproduksi hingga 52 kali koleksi pakaian dalam setahun.<sup>1</sup>

Sejak tahun 2000 hingga 2014 *fast fashion* mampu meningkatkan jangkauan konsumen hingga 60%.<sup>2</sup> Perusahaan *fast fashion* dapat mencapai keuntungan hingga 1,2 triliun US Dollar pertahunnya yang mendorong produsen selalu mengikuti perkembangan zaman akibat tingginya permintaan konsumen. Bahkan industri fashion menjadi industri dengan pertumbuhan ekspor terkait tekstil dan kali lebih besar dibanding rata-rata ekspor dunia pada tahun 2013.<sup>3</sup> Hal ini diiringi dengan munculnya sosial media serta situs-situs seperti *e-commerce* yang semakin memudahkan konsumen.

Hampir 90% produksi dilakukan di negara berkembang karena masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, upah rendah, UU Ketenagakerjaan serta penegakan

---

<sup>1</sup> Yordan Gunawan, Anandiva Matahariza, and Wiwit Kharisma Putri, "The Dark Side of Fast Fashion: Examining the Exploitation of Garment Workers in Bangladesh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 441–68, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.441-468>.

<sup>2</sup> Anita Hartman, "Fast Fashion and Its Effect on the Fashion Industry: An Ethical Debate," research-archive.org, August 11, 2023, <https://research-archive.org/index.php/rars/preprint/view/328/604>.

<sup>3</sup> Tri Apriliani, "Hubungan Kerja Dalam Industri Fast Fashion: Analisis Isu Terhadap Fenomena Eksploitasi (Studi Kasus Film the True Cost Dan Nike Sweatshop)," *INFORMASI* 46, no. 1 (June 14, 2016): 33, <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9647>.

hukum yang lemah.<sup>4</sup> Bangladesh sebagai salah satu produsen garmen terbesar di dunia kedua setelah Tiongkok, khususnya dalam pakaian jadi atau *Ready Made Garment* (RMG).<sup>5</sup> Sebagai negara berkembang dengan lahan pertanian yang cukup kuat, Bangladesh perlahan bergerak fokus kepada industri garmen sejak tahun 1976. Dalam tiga dekade terakhir, industri garmen mengalami peningkatan hingga sepuluh kali lipat dibanding sebelumnya yang menyumbang hampir 80% dari devisa negaranya.<sup>6</sup> Sehingga, para produsen mencari lokasi produksi di negara-negara dunia ketiga agar dapat mencapai efisiensi dari biaya produksi dengan upah tenaga kerja yang relatif murah dibanding negara-negara maju.

Sekitar 4.5 juta jiwa masyarakat di Bangladesh bekerja sebagai buruh dalam industri garmen dan 80% pekerjaannya adalah perempuan.<sup>7</sup> Dominasi perempuan dalam sektor ini tidak diikuti dengan jaminan pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti infrastruktur yang kurang baik, diskriminasi gender, ancaman atau intimidasi, pelecehan seksual serta tidak diberikannya perlindungan sosial, seperti cuti hamil, perawatan kesehatan, penitipan anak, tunjangan, upah kerja lembur, serikat pekerja.<sup>8</sup> Perempuan mendapatkan 30% upah lebih rendah dari laki-laki.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Rachel Bick, Erika Halsey, and Christine C. Ekenga, "The Global Environmental Injustice of Fast Fashion," *Environmental Health* 17, no. 1 (December 27, 2018): 1–4, <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>.

<sup>5</sup> Ratih Dinda Apsari, Sri Yuniati, and Suyani Indriastuti, "Penerapan Konvensi ILO Pada Industri Garmen Bangladesh (Studi Kasus: Diskriminasi Pekerja Garmen Perempuan)," *Electronical Journal of Social and Political Sciences* 9, no. 3 (2022).

<sup>6</sup> Nazrul Islam et al., "Working Conditions and Lives of Female Readymade Garment Workers in Bangladesh," [papers.ssrn.com](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2921867) (Rochester, NY, February 22, 2017), [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2921867](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2921867).

<sup>7</sup> BGMEA. (2024). *Export Performance Statistics*. <https://www.bgmea.com.bd/>

<sup>8</sup> Ratih Dinda Apsari, Sri Yuniati, and Suyani Indriastuti, "Penerapan Konvensi ILO Pada Industri Garmen Bangladesh (Studi Kasus: Diskriminasi Pekerja Garmen Perempuan)," *Electronical Journal of Social and Political Sciences* 9, no. 3 (2022).

<sup>9</sup> Solene Schirrer, "Fast Fashion and the Gendered Reality of Exploitation," [Fabricofchange.ie](https://www.fabricofchange.ie/), 2019, <https://www.fabricofchange.ie/articles/fast-fashion-and-the-gendered-reality-of-exploitation>.

Peluang yang dimiliki perempuan juga lebih terbatas, kurang dari 5% dalam peran manajerial di Bangladesh.<sup>10</sup>

Pekerja wanita di pabrik garmen mendominasi dianggap menguntungkan bagi perusahaan karena dianggap lebih patuh dan murah. Kondisi pekerjaan yang tidak kondusif dengan adanya eksploitasi dan diskriminasi gender terhadap para pekerja wanita yang dilakukan oleh para petinggi di perusahaan tersebut.<sup>11</sup> Lemahnya penegakan hukum, norma budaya dan prioritas pada keuntungan di atas kesejahteraan pekerja melanggengkan eksploitasi berbasis gender. Meskipun perempuan menjadi pilar utama dalam rantai pasok global industri garmen, namun justru berada dalam posisi yang paling rentan terhadap eksploitasi.<sup>12</sup> Bangladesh memiliki historis terkait kecelakaan kerja yang parah pada tahun 2013 yang mengakibatkan 1135 buruh meninggal dunia dan 2500 buruh terkena reruntuhan.<sup>13</sup> Ini menjadi catatan kecelakaan terburuk yang pernah terjadi dalam industri garmen.

Diskriminasi perempuan dan buruknya historis kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Bangladesh menunjukkan rendahnya standar kelayakan kerja. Hal ini menjadi sorotan dalam isu pembangunan global saat ini melalui 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang diratifikasi negara dan disahkan oleh PBB pada tahun 2015.<sup>14</sup> Pada SDG 8 menargetkan penciptaan *decent work and inclusive economic growth* dalam menciptakan pekerjaan layak melalui perlindungan hak

---

<sup>10</sup> Rishi Agarwal et al., "Future of Work for Female Garment Workers in Bangladesh," April 2022, asianfoundation.org.

<sup>11</sup> Nazrul Islam et al., "Working Conditions and Lives of Female Readymade Garment Workers in Bangladesh," papers.ssrn.com (Rochester, NY, February 22, 2017), [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2921867](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2921867).

<sup>12</sup> Gender (In)equality and Discrimination In The Readymade Garments Sector Of Bangladesh: Is The Experience Of The (Female) Office.

<sup>13</sup> Shakira Wanduragala, "How Fast Should Fashion Really Be? An Investigation into Whether It Is Possible for 'Fast Fashion' to Adapt to Meet Social Sustainability Goals," *Journal of Sustainable Development* 17, no. 2 (January 9, 2024): 35, <https://doi.org/10.5539/jsd.v17n2p35>.

<sup>14</sup> United Nations, "Sustainable Development Goals," United Nations, n.d., <https://sdgs.un.org/>.

pekerja, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan pilar SDG 8 terkait pekerjaan layak terdapat target indikator pekerjaan layak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam praktiknya ini bertujuan menghapuskan segala bentuk kerja paksa, perlindungan hak buruh serta peningkatan kondisi kerja. International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi internasional memiliki agenda pekerjaan layak yang dibangun atas 4 pilar yaitu hak-hak ditempat kerja, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dialog sosial dan kesetaraan gender sebagai tujuan lintas sektoral.<sup>15</sup> ILO juga sebagai pihak tripartite memiliki prioritas terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dialog sosial yang efektif dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja rentan.<sup>16</sup> ILO membantu mengawasi negara agar menerapkan standar ketenagakerjaan sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan agar dapat menciptakan pekerjaan layak dan aman sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam agenda global atau SDGs.

Pekerjaan layak yang dijelaskan oleh ILO bertujuan membangun peluang yang adil, aman ditempat kerja, perlindungan sosial, kebebasan berekspresi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan setara. Respon terhadap isu-isu ketenagakerjaan di Bangladesh mendorong terbentuknya program *Better Work Bangladesh* (BWB) pada tahun 2015 yang diinisiasi oleh *International Labour Organization* (ILO) dan *International Finance Corporation* (IFC) bertujuan membangun kapasitas di tingkat pabrik dan struktural nasional dengan

---

<sup>15</sup> ILO, "Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh," 2020, [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms\\_754669.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_754669.pdf).

<sup>16</sup> ILO 2020

pendekatan multi aspek, menggabungkan pemantauan, pembangunan kapasitas, keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan standar perburuhan dan kondisi kerja di Bangladesh.<sup>17</sup>

Program *Better Work Bangladesh* memiliki tiga tahapan yaitu fase pertama tahun 2014-2017 yang menjadi dasar pembentukan dan membantu pemerintah menyalarkan UU Ketenagakerjaan Bangladesh dengan standar internasional. Fase kedua tahun 2018-2022 dengan memperluas operasinya serta membentuk inisiatif berupa *Gender Equality and Returns (GEAR)*, inisiatif perlindungan hak maternitas atau *Mothers@Work* sebagai bentuk upaya peningkatan kesetaraan hak-hak bagi pekerja perempuan di industri garmen bangladesh. Selanjutnya, fase ketiga yaitu tahun 2022-2027 dengan strategi tujuan perencanaan yaitu meningkatkan kesadaran terhadap UU Ketenagakerjaan nasional serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja serta pemulihan pasca COVID-19 bagi perusahaan agar lebih inklusif. Dalam mencapai *outcome* pada tahun 2027 dengan dampak terhadap pekerja, bisnis terkait kepatuhan terhadap lembaga-lembaga nasional melalui pendekatan *Better Work* dan bukti yang nyata. Perusahaan yang berpartisipasi melalui BWB dapat mengadopsi kebijakan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab agar mendukung terwujudnya pekerjaan layak serta dampak dari BWB terhadap lingkungan dan sosial agar menjadi program yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Harry Panduari Tambun, "Peran ILO (International Labour Organization) Dalam Menangani Kecelakaan Kerja Pada Industri Garmen Di Bangladesh Studi Kasus Tragedi Rana Plaza Tahun 2013," *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 1, <https://media.neliti.com/media/publications/32522-ID-peran-ilo-international-labour-organization-dalam-menangani-kecelakaan-kerja-pad.pdf>.

<sup>18</sup> Better Work Bangladesh, "Bangladesh," Better Work, n.d., <https://betterwork.org/bangladesh/>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bangladesh merupakan salah satu negara dengan pekerja dalam sektor garmen yang paling besar dan didominasi oleh perempuan. Namun, pada praktiknya dominasi perempuan di sektor garmen Bangladesh tidak sejalan dengan pemenuhan hak-hak mereka. Para pekerja perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti pelecehan seksual, upah yang lebih rendah, jam kerja yang lebih tinggi, pemecatan sepihak akibat melahirkan atau hamil, serta minimnya peran perempuan dalam posisi atau jabatan yang lebih tinggi di sektor ini akibat masih tingginya budaya patriarki di Bangladesh. Peran perempuan di lingkungan kerja cenderung diabaikan yang menunjukkan ketidakselarasan UU Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Bangladesh melalui Konvensi ILO terkait kesetaraan di lingkungan kerja. Hal ini juga tidak sejalan dengan poin yang terdapat dalam agenda SDG 8 terkait pekerjaan layak. Sehingga penelitian ini ingin mengkaji bagaimana fungsi *International Labour Organization* (ILO) melalui program *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh yang sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana fungsi *International Labour Organization* (ILO) melalui program *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait pelaksanaan fungsi *International Labour Organization* (ILO) melalui program *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian dalam studi Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami peran dan efektivitas organisasi internasional *International Governmental Organizations* (IGOs) dalam mewujudkan norma ketenagakerjaan dalam sistem global. Pembahasan berfokus pada fungsi-fungsi *International Labour Organization* (ILO) melalui program *Better Work* Bangladesh (BWB), Penelitian dapat menambah literatur terkait penerapan konsep pekerjaan layak dan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Lebih lanjut, penerapan teori Karns dan Mingst dalam konteks empiris ini memberikan pemahaman lebih mendalam terkait bagaimana fungsi informasi, forum, normatif, pembuat aturan dan pengawas aturan, operasional dan penyebaran ide dari sebuah organisasi internasional berkontribusi terhadap perlindungan hak pekerja perempuan di negara berkembang.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan kepada pembaca dalam mencapai agenda global dengan memperbaiki kondisi dan

standar ketenagakerjaan, kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak pekerja dalam sektor garmen di Bangladesh, baik pemerintah, pelaku industri, maupun organisasi internasional baik *International Governmental Organization (IGO)* maupun *Non-Governmental Organization (NGO)*, masyarakat nasional serta masyarakat global dalam memahami dan mendorong reformasi kebijakan baik di Bangladesh maupun negara-negara yang masih menghadapi permasalahan serupa.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Dalam menjawab pertanyaan terkait penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber dari beberapa studi pustaka dan dijadikan sebagai acuan. Studi Pustaka yang pertama adalah “Decent Work, Human Rights and the Sustainable Development Goals”.<sup>19</sup> Artikel jurnal yang ditulis oleh MacNaughton dan Frey pada tahun 2016 ini menjelaskan terkait poin pekerjaan layak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dalam mencapai pekerjaan yang layak tidak hanya dilihat dari cukupnya upah yang diberikan, namun juga mencakup ke dalam diberikannya kebebasan berserikat, jaminan sosial dan kontribusi untuk melakukan pengambilan keputusan. Tulisan ini membantu peneliti menjadi acuan melihat indikator pemenuhan dan konsep terkait pekerjaan layak dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda global dan praktik penerapannya dalam sektor industri garmen di Bangladesh. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>19</sup> Gillian MacNaughton and Diane F. Frey, “Decent Work, Human Rights and the Sustainable Development Goals,” *SSRN Electronic Journal* 47 (2015), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2613999>.

Penelitian kedua yaitu merujuk pada artikel jurnal berjudul “Impact of Fast Fashion in Bangladesh: An Analysis of the Role of the Alliance for Sustainable Fashion” oleh Salsabila Andi dan Sidik pada tahun 2022.<sup>20</sup> Penelitian ini menjelaskan keterlibatan aktor internasional seperti organisasi internasional dalam melakukan kolaborasi terkait permasalahan *fast fashion* yang destruktif yang berdampak terhadap lingkungan dan buruh. Tulisan ini menjelaskan program-program yang dibentuk dalam menangani permasalahan yang terjadi di Bangladesh akibat produksi besar-besaran, upah rendah, eksploitasi pekerja dan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kritik internasional. Penelitian ini berkontribusi terhadap penjelasan terkait industri garmen Bangladesh yang berdampak terhadap buruh dan lingkungan yang menjadi acuan dalam mengambil data bagi peneliti. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus dan aktor pada studi kasus yang berbeda.

Artikel Jurnal ketiga berjudul “State’s Obligation to Ratify ILO Conventions C155, C166 and C187: A Review of Bangladesh’s RMG Sector” pada tahun 2023 yang ditulis oleh ASM Anam Ullah. Dalam jurnal artikel ini dijelaskan terkait amandemen pada hukum ketenagakerjaan dengan hambatan pemerintah dalam melakukan ratifikasi terhadap sejumlah konvensi ILO terkait Konvensi K3 dan keterkaitannya dengan pengimplementasian pada praktik kerja yang masih lemah. Artikel jurnal ini memberikan penulis gambaran terkait pemerintah Bangladesh yang masih mengalami hambatan dalam melakukan komitmen politik dan penegakan hukum yang masih cenderung tidak memperhatikan hak-hak pekerja

---

<sup>20</sup> Salsabila Andi Jani and Sidik Jatmika, “Impact of Fast Fashion in Bangladesh: An Analysis of the Role of the UN Alliance for Sustainable Fashion,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (January 13, 2023): 592–605, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i1.4330>.

yang menunjukkan kesadaran politik terhadap norma internasional masih kurang. Politik domestik cenderung kapital, dimana lebih memprioritaskan investasi asing dan keuntungan ekonomi dibandingkan hak para pekerja.

Adanya pengaruh globalisasi dan neoliberalisme dijelaskan dalam artikel jurnal ini. Jurnal artikel ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian peneliti. Pada jurnal ini dijelaskan menggunakan analisis pada teori neoliberalisme terhadap sikap pemerintah dalam menghadapi perekonomian global tanpa memperhatikan hak-hak pekerja. Tulisan ini memberikan kontribusi kepada peneliti dalam melihat hambatan yang terjadi terhadap ratifikasi dan pelaksanaan konvensi ILO yang memberikan peran ILO yang rentan dalam tatanan global. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan melihat isu yang terjadi disektor garmen Bangladesh, namun memiliki perbedaan pada tingkat analisis dan fokus yang digunakan dalam penelitian. Jurnal artikel ini menyoroti hambatan pada implementasi kebijakan domestik, sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada pengimplementasian inisiatif program seperti *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan adil dan layak dengan memperhatikan aspek gender yang dilakukan oleh ILO dan IFC.<sup>21</sup>

Artikel Jurnal keempat berjudul “Implementation of The Core International Labour Rights Regime in Bangladesh Garments Industries and Its Challenges”.<sup>22</sup>

Tulisan yang terdapat dalam “Journal of Asian and African Social Science and

---

<sup>21</sup> ASM Anam Ullah, “View of State’s Obligation to Ratify ILO Conventions C155, C161 and C187: A Review of Bangladesh’s RMG Sector,” *Ej-Politics.org*, last modified October 2023, <https://www.ej-politics.org/index.php/politics/article/view/110/74>.

<sup>22</sup> Moin Uddin, Md Zahidul Islam, and Md Salah Uddin, “The Implementation of the Core International Labour Rights Regime in Bangladesh Garments Industries and Its Challenges,” *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 8, no. 3 (September 30, 2022): 42–54, <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.275>.

Humanities” yang ditulis oleh Moin Uddin, Md. Zahidul Islam dan Md Salah Uddin ini menjelaskan tentang penerapan hak-hak buruh internasional di industri garmen Bangladesh. Moin menjelaskan bahwa pemerintah Bangladesh menunjukkan ketidaksielarasan dengan tidak mematuhi standar internasional dalam menerapkan standar ketenagakerjaan. Secara teoritis, memang pemerintah membuat UU sesuai dengan standar ILO, namun hal itu tidak sejalan dengan penerapan secara praktis. Sehingga, banyak menimbulkan masalah bagi pekerja atau buruh yang merusak industri garmen. Dalam tulisan ini juga diharapkan bahwa pemerintah harus mengedepankan lagi perannya untuk mengambil langkah tegas dan efektif dalam menerapkan standar ketenagakerjaan sesuai dengan konvensi ILO.<sup>23</sup>

Tulisan ini dapat membantu peneliti mendapatkan peran pemerintah Bangladesh yang tidak efektif dalam menangani permasalahan buruh di industri garmen. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian ini membahas terkait organisasi internasional yaitu ILO melalui program *Better Work* yang berfokus pada isu kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh.

Artikel jurnal kelima berjudul Artikel jurnal kelima berjudul “Nature of Human Rights Violation on Female Garments Workers in Bangladesh” tahun 2023 yang ditulis oleh Md Basirulla dan Farhat Tasnim pada jurnal *Khazanah Hukum*. Jurnal ini menjelaskan terkait peran pekerja perempuan pada sektor garmen Bangladesh yang menyumbang hampir dari 80% tenaga kerja yang memberikan sumbangan terbesar terhadap devisa negara Bangladesh yaitu mencapai hampir dari 83% devisa negaranya. Artikel jurnal ini berisi pelanggaran yang terjadi pada pekerja

---

perempuan di lingkungan kerja yang sudah melanggar HAM dengan melakukan survey, wawancara dengan para pekerja di beberapa pabrik terpilih.<sup>24</sup>

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap realitas yang terjadi pada pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh dan menjadi acuan kekerasan berbasis gender masih berlaku yang melanggar HAM pada pekerja perempuan. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, meskipun sama-sama membahas kekerasan yang terjadi pada pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh. Tulisan ini menjelaskan pelanggaran HAM yang masih terjadi pada pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh yang dilihat dari aspek hukum. Sedangkan peneliti lebih berfokus terhadap upaya dari organisasi internasional seperti ILO dalam membantu mewujudkan pekerjaan yang layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh.

## **1.7 Konseptual Penelitian**

### **1.7.1 Organisasi Internasional**

Isu dalam Hubungan Internasional semakin kompleks, perkembangan ini menjadi semakin kompleks aktor yang berperan dalam sistem internasional. Pada tahun 1919, dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah terjadinya perang dan konflik yang berkelanjutan antar negara. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya institusi internasional yang bertujuan mencapai tujuan negara-negara dalam sistem internasional.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Md. Basirulla, Farhat Tasnim, and Md. Sultan Mahmud, "Female Garment Workers in Bangladesh Facing Human Rights Violation; a Search to Find the Root Causes," *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 16, no. 3 (December 16, 2024): 85–103.

<sup>25</sup> Mohamad Rosyidin, *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2020).

Dalam konteks hubungan internasional, Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu bentuk institusi formal dengan segenap sistem aturan yang memiliki tujuan yang jelas, serta instrumen administratif yang rasional dan teknis. Organisasi ini dicirikan oleh adanya struktur material dan teknis seperti konstitusi, kantor, perlengkapan fisik, staf administratif, hingga hierarki organisasi. Meskipun sebagian besar bergantung pada negara dan kelompok dalam negara, organisasi internasional memiliki eksistensi yang terpisah dan konkret dalam hubungan internasional yang terorganisasi secara reguler.<sup>26</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, Archer mengutip pendapat beberapa ahli, seperti Selznick yang memandang organisasi sebagai instrumen administrasi yang rasional, Duverger yang menekankan bahwa organisasi internasional memiliki struktur formal dan material, seperti konstitusi, hierarkis kelembagaan. Organisasi internasional tidak hanya sebagai entitas fisik atau kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari proses yang luas dalam hubungan internasional. Hal ini menjelaskan bahwa OI sebagai upaya kolektif negara dan aktor non-negara dalam menciptakan stabilitas, keteraturan dan kerja sama untuk mencapai stabilitas dalam sistem internasional.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini berfokus kepada organisasi internasional yang menjadi aktor yang memiliki peranan yang signifikan dalam sistem internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur organisasi formal yang memiliki sekretariat tetap dan memiliki dua atau lebih negara anggota.<sup>28</sup> Organisasi

---

<sup>26</sup> Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed. (London: Routledge, 2001).

<sup>27</sup> *Ibid.*, 2–3.

<sup>28</sup> Jon Pevehouse and Inken Von Borzyskowski, “The Oxford Handbook of International Organizations in World Politics,” 2016, [https://www.borzyskowski.net/wp-content/uploads/2013/05/Pevehouse-Borzyskowski\\_2016\\_IOs-in-World-Politics-3.pdf](https://www.borzyskowski.net/wp-content/uploads/2013/05/Pevehouse-Borzyskowski_2016_IOs-in-World-Politics-3.pdf).

internasional bertujuan untuk memecahkan isu-isu kompleks yang tidak bisa dipecahkan oleh negara-negara, karena keterbatasan yang dimiliki oleh negara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam sistem hubungan internasional, organisasi internasional memiliki dominasi penting sebagai aktor rasional dalam setiap pembuatan kebijakan.

Archer mendefinisikan bahwa sebuah organisasi internasional memiliki suatu struktur formal dengan sifat berkelanjutan dengan memiliki tujuan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah atau adanya keterlibatan antara minimal dua negara berdaulat yang memiliki tujuan serta kepentingan yang sama.<sup>29</sup> Archer mengelompokkan organisasi internasional ke dalam dua kategori, yaitu menjadi Intergovernmental Organizations (IGOs) yang terdiri dari tiga atau lebih negara yang berdaulat sebagai anggotanya dan International Non-Governmental Organizations (INGOs) atau merupakan organisasi non-pemerintah yang berisikan keanggotaan individu maupun kelompok dan tidak memiliki afiliasi langsung dengan pemerintahan.

IGO sebagai organisasi pemerintah yang berada pada tingkat negara-bangsa. Organisasi ini dibentuk berdasarkan perjanjian antar negara dan pendanaan yang difasilitasi oleh organisasinya. IGO bertujuan untuk mencapai kepentingan kolektif negara anggotanya dalam sebuah forum dengan sistem negosiasi yang stabil. Organisasi sebagai alat untuk negara mencapai kepentingan mereka terkait isu internasional untuk melaksanakan pelaksanaan tugas kolektif berdasarkan norma yang berlaku.<sup>30</sup> Sehingga, IGO mampu mempengaruhi dan menerapkan batasan atau aturan pada kebijakan negara anggota mereka. Organisasi sebagai fasilitator

---

<sup>29</sup> Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed. (London: Routledge, 2001).

<sup>30</sup> Clive Archer, *International Organizations*, 3rd ed. (London: Routledge, 2001).

demi terciptanya prinsip, aturan dan norma dalam mewujudkan sebuah kebijakan pada negara-negara anggota yang berkaitan dengan isu global.

Karns, Mingst & Stiles dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* menjelaskan studi terkait global governance tidak dapat dilepakan dari peran sebuah organisasi internasional. Karns and Mingst menjelaskan pemahaman terkait organisasi internasional dalam tata kelola global melalui berbagai fungsi yang dilakukan.<sup>31</sup> Organisasi internasional memainkan peran krusial dalam dinamika hubungan antarnegara melalui beragam fungsi yang dijalankannya. Dalam menjalankan fungsinya, Karns & Mingst menjelaskan tujuh fungsi yang dimiliki oleh IGO yaitu:

**Tabel 1. 1 Tujuh Fungsi IGO Menurut Karns**

<b>Fungsi IGO</b>	<b>Pengertian</b>
<i>Informational</i> (informasi)	Melakukan peningkatan pemahaman global dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data relevan kepada negara-negara anggota.
<i>Forum</i> (forum)	menyediakan wadah penting bagi pertukaran pandangan, negosiasi, dan pengambilan keputusan kolektif terkait isu-isu internasional.
<i>Normative</i> (normatif)	berperan dalam merumuskan standar perilaku dan ekspektasi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global.

<sup>31</sup> Margaret P Karns and Karen A Mingst, *International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder (Colo.) ; London: L. Rienner, 2004).

<i>Rule Creation</i> (Pembuat Aturan)	pembuat aturan dengan menyusun perjanjian dan instrumen hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat.
<i>Rule Supervision</i> (Pengawas Aturan)	Efektivitas aturan yang telah dibuat kemudian dilakukan pengawasan melalui pemantauan kepatuhan, penyelesaian sengketa hingga tindakan penegakan hukum.
<i>Operational</i> (Operasional)	fungsi operasional dengan mengimplementasikan program dan kebijakan melalui alokasi sumber daya, penyediaan bantuan teknis, dan bahkan pengerahan kekuatan di lapangan sesuai kebutuhan.
<i>Idea generation</i> (Penyebaran ide) <sup>32</sup>	Membuat ide atau inovasi baru yang bertujuan untuk memberikan respon terhadap suatu isu/ tantangan global. Fungsi ini bertujuan agar IGO mampu membentuk gagasan, mengembangkan, menyebarkan gagasan baru untuk menentukan kebijakan global atau sebuah norma internasional.

Berdasarkan penjabaran terkait definisi dan fungsi dari Organisasi Internasional, peneliti akan menggunakan teori fungsi organisasi internasional yang telah dijabarkan oleh Karns & Mingst. Berdasarkan fungsi IGO yang dijelaskan akan membantu peneliti menjelaskan terkait upaya yang dilakukan oleh ILO

<sup>32</sup> Margaret P Karns and Karen A Mingst, *International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder (Colo.) ; London: L. Rienner, 2004).

melalui program *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mempelajari, menganalisis serta mencari dan memperoleh jawaban atas fenomena yang diteliti secara terstruktur dan sistematis. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan secara kualitatif yaitu berfungsi sebagai alat untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam dengan melakukan penekanan pada makna, pengalaman dan sudut pandang dari sebuah subjek penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

### **1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap interpretasi peneliti pada data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan bagaimana fungsi *International Labour Organization* (ILO) dijalankan melalui program *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Untuk lebih memahami tujuan penelitian, diperlukan batasan-batasan dalam penulisan yang jelas. Dalam penelitian ini akan membahas terkait upaya ILO melalui Program *Better Work* dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh dengan rentang waktu yaitu pada tahun

2015 hingga 2024. Tahun 2015 sebagai awal munculnya program dan batasan yang digunakan hingga tahun 2025 saat penelitian ini dilakukan.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Dalam melakukan penelitian, unit analisis dipahami sebagai objek yang akan menjadi fokus kajian dan analisis. Unit eksplanasi merujuk pada entitas yang akan mempengaruhi perilaku maupun karakteristik dari sebuah unit analisis yang digunakan. Tingkatan pada level analisis mengacu pada posisi unit yang diteliti yang merujuk pada individu, kelompok, organisasi, masyarakat hingga global. Tingkat analisis ini berfungsi dalam membantu menentukan ruang lingkup yang akan diteliti secara jelas dan terperinci.

Dalam penelitian ini, unit analisis yang menjadi fokus kajian adalah *Better Work* Bangladesh dan unit eksplanasinya dalam menjelaskan penelitian ini yaitu pekerjaan layak dalam mengatasi isu kekerasan berbasis gender pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh. Penelitian ini memfokuskan analisis pada tingkat analisis negara.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data secara sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder merupakan sebuah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber penelitian sebelumnya. Data sekunder sebagai sumber data yang tidak langsung diterima atau dikumpulkan oleh para peneliti, bisa melalui pihak lain atau dokumen-dokumen grafis, *e-book*, foto, video, dan berbagai sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam sebuah penelitian harus memiliki validitas yang juga bisa di uji kebenarannya.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti jurnal, dokumen, dan laporan resmi yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari website resmi ILO, *Better Work*, SDGs, pemerintah Bangladesh, dan sebagainya yang menunjang sebagai acuan data-data yang relevan sesuai dengan kebutuhan dari penulisan ini.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang digunakan dalam menganalisis yaitu analisis data secara kualitatif. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai referensi, seperti jurnal nasional maupun internasional, studi literatur, *e-book*, serta situs resmi yang relevan dengan topik yang dianalisis dalam penelitian. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan mengaitkannya pada konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian. Mengacu pada model analisis yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Dalam bukunya, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data atau penarikan kesimpulan.<sup>33</sup>

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menggunakan tiga hal utama mode dalam melakukan analisis data. Tahap pertama yaitu reduksi data dengan proses menyaring, memilah, dan menyederhanakan informasi dari hasil maupun studi pustaka yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini informasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti bentuk perlindungan hak pekerja perempuan, upaya ILO melalui Program *Better Work* dan keterkaitannya dengan indikator SDGs mengenai

---

<sup>33</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31–33, <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>.

pekerjaan layak. Proses reduksi dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga tahap akhir analisis, sehingga hanya informasi yang relevan, otentik, dan mendukung fokus penelitian yang dipertahankan. Reduksi ini penting untuk mencegah bias serta membantu peneliti menjaga fokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>34</sup>

Selanjutnya yaitu penyajian data dengan merangkum hasil reduksi dalam bentuk sistematis untuk mengidentifikasi dinamika dalam konteks program *Better Work*. Penyajian data yang baik juga dapat mengevaluasi keterkaitan antara pelaksanaan program dan dampak terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan. Tahap terakhir yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yaitu proses analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara awalnya, lalu diverifikasi melalui proses interpretasi berulang serta pengujian konsistensi antar data. Penarikan kesimpulan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara substantif, termasuk bagaimana upaya ILO melalui Program *Better Work* sebagai aktor kerja sama internasional dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian sebagai landasan awal dalam penelitian yang dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang dalam memilih topik yang akan dikaji.

---

<sup>34</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31–33, <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>.

Pada bab ini juga menjelaskan terkait tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai baik secara teoritis maupun secara praktis. Sumber relevan sebagai penyusunan dalam penulisan studi pustaka yang mendorong penelitian ini memiliki sumber yang kuat. Kerangka konseptual juga dijabarkan dalam memberikan gambaran terkait perspektif analitis guna menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian yang mencakup teknik pengumpulan data, analisis data serta penutup yang menjadi sistematika penulisan yang menggambarkan struktur penulisan dalam penelitian ini.

## **BAB II DISKRIMINASI PEKERJA PEREMPUAN DAN PEKERJAAN LAYAK DI INDUSTRI GARMEN BANGLADESH**

Pada bab ini akan membahas terkait isu diskriminasi, kesenjangan dan kebebasan yang terjadi pada pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh serta peran pemerintah dalam mengakkan regulasi hukum ketenagakerjaan nasional di Bangladesh dan penjelasan terkait konsep pekerjaan layak yang ditetapkan oleh *Intenational Labour Organization* (ILO) yang relevan dengan indikator pada *Sustainable Development Goals* (SDG) 8.

## **BAB III *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) DAN *BETTER WORK PROGRAMME***

Pada bab ini membahas seputar *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional dengan menjelaskan latar belakang, tujuan, prinsip, pendanaan, ratifikasi, visi, misi dan prinsip ILO terkait pekerjaan layak. Selanjutnya, menjelaskan terkait program *Better Work* Bangladesh yang sudah ada

sejak tahun 2015 di Bangladesh yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDG) 8 terkait pekerjaan layak.

#### **BAB IV FUNGSI *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) MELALUI PROGRAM *BETTER WORK* DALAM MEWUJUDKAN PEKERJAAN LAYAK BAGI PEKERJA PEREMPUAN INDUSTRI GARMEN DI BANGLADESH**

Bab ini memaparkan upaya yang dilakukan oleh ILO dalam melihat fungsi sebuah international governmental organization (IGO) menurut Karns, Mingst dan Stiles melalui Program Better Work yang telah beroperasi sejak tahun 2015 dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja perempuan industri garmen di Bangladesh.

#### **Bab V PENUTUP**

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penggunaan konsep yang telah digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pada bab ini juga memberikan saran atau rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil temuan penelitian, Sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan kajian selanjutnya.